

KPU JABAR AJAK MAHASISWA AKTIF MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH



Narasumber berfoto bersama mahasiswa dalam acara sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (9/9/2024)

BANDUNG – Komite Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat bekerja sama dengan Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Jabar menggelar sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (9/9/2024).

Acara yang dihadiri oleh 80 peserta, termasuk mahasiswa dan anggota Mapancas ini digelar dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam Pilkada 2024.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia memberikan pandangan mengenai manfaat demokrasi.

"Demokrasi itu tidak hanya mahal tapi juga melelahkan karena kekuasaan itu tidak terkonsolidasi pada satu tangan. Dan hal ini yang terjadi sekarang," ucap Hedi.

"Di sisi lain demokrasi itu kelebihanannya adalah bahwa siapapun boleh berbicara, siapapun boleh menyatakan pendapatnya. Nah itu salah satu kelebihan dari demokrasi dimana partisipasi rakyat itu wajib partisipasi rakyat itu harus didengarkan," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak mahasiswa Mapancas untuk berperan aktif dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih di Jabar yang ditargetkan naik 2 persen dari Pilkada sebelumnya.

"Saya berharap mahasiswa Pancasila harus bisa mengambil peran agar angka partisipasi pemilih di Jawa Barat itu bisa naik. Kita targetkan angka partisipasi pemilih itu naik 2 persen kalau di Pilkada 2020 itu angka partisipasi pemilih rata-rata itu 74 persen maka di 2024 ini kita harapkan naik 2 persen lah," tuturnya.

"Walaupun naik 2 persen pun itu bukan perkara mudah apalagi dengan kondisi mood publik yang beberapa waktu lalu diwarnai dengan yang terjadi media sosial yaitu Kampanye Peringatan Darurat," tambahnya.

Hedi juga berharap, Mapancas menggunakan hak pilihnya dengan bijak dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 27 November nanti.

"Sekali lagi saya berharap betul lampu penyelenggara Pemilu bahwa angka partisipasi pemilih kita buat naik kemudian juga kita mendapatkan memang pemimpin yang membawa kemajuan bagi daerahnya masing-masing itu saja yang dapat saya sampaikan," harapnya.

Sementara itu, praktisi kepemiluan sekaligus senior Mapancas, Husni Farhani Mubarak menyoroti tantangan demokrasi saat ini, terutama pesimisme di kalangan kaum muda.

"Bonus demografi dan bonus demokrasi harus dimanfaatkan untuk menciptakan



Peserta mengikuti acara Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (9/9/2024)



Peserta memperhatikan paparan narasumber dalam acara Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (9/9/2024)



Suasana Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (9/9/2024)

demokrasi yang sehat dan berkualitas tinggi," ujar Husni.

Menurutnya, bonus demokrasi dalam konteks yang sama dengan bonus demografi adalah dimana jumlah pemilih pemula nanti data yang lebih depan.

"Pertanyaannya pada konteks yang sama adalah, apakah bonus demografi dan bonus demokrasi tersebut linier, sesuai dengan hasil akhir dari nasib bangsa ini," ungkapnya.

Husni mengatakan, jika bonus demografi diharapkan menciptakan bangsa yang berdaya saing tinggi, sedangkan bonus demokrasi melahirkan demokrasi yang sehat, berkualitas tinggi dalam semua aspek penilaiannya.

"Kalau kita ukur, hari ini misalnya akan sangat subjektif, mau menyebut demokrasi sekarang sehat atau sah tergantung posisi kita. Karena kalau sudah bicara demokrasi, temen-temen tetapnya adalah politik," jelasnya.

"Politik itu selalu standarnya adalah kepentingannya. Kita sedang berada dalam kepentingan yang satu, waktu itu kita akan memperkuat posisi yang satu," lanjutnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar, Syaiful Bachri mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif.

"Peran mahasiswa bukan hanya datang memilih, tapi juga mengawal proses Pilkada agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkapnya.

Bagi Syaiful, pandangan tingkat partisipatif itu bukan hanya orang datang berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan.

"Buat apa naik partisipasi publik, tapi di dalamnya ancur-ancuran gitu loh kecurangan tinggi, pelanggaran banyak, dan segala macemnya," ujarnya.

Menurutnya, kehadiran Bawaslu sendiri adalah untuk meminimalisir satu proses pelanggaran.

"Kalau ada pelanggaran, disitulah hadirnya Bawaslu dan masyarakat untuk mengawasi baik, lanjut partisipatif tentunya kita tahulah artinya yang berkaitan dengan menggambarkan sebuah pendekatan atau proses yang melibatkan partisipasi aktif," katanya.

Ketua DPD Mapancas Jabar, Awi Jaya menyampaikan apresiasi atas kehadiran lebih dari 85 peserta yang melebihi target awal.

"Ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari para mahasiswa terhadap Pilkada 2024," ujar Awi Jaya.

Awi juga menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mencerdaskan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin yang tepat.

Pihaknya juga berharap, semangat mahasiswa dan pemuda Jabar semakin menggelora untuk turut serta dalam Pilkada 2024.

"Bukan hanya sekadar datang ke TPS, tapi juga membawa perubahan nyata untuk masa depan Jawa Barat yang lebih baik," pungkasnya.